



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 871/VII/2015

II/JULI 2015



Pemerintah Diminta Optimal Layani Pemudik



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

Pemerintah Diminta Optimal Layani Pemudik



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Komisi V DPR melakukan sidak ke Stasiun Kereta Api Pasar Senen

Ketua DPR RI Setya Novanto beserta Komisi V DPR melakukan sidak ke Stasiun Kereta Api Pasar Senen, Jakarta Pusat memantau persiapan arus mudik Lebaran 2015. Ia berharap pemerintah dalam hal ini PT KAI (Kereta Api Indonesia) berupaya optimal dalam memberikan layanan terbaik kepada para pemudik tahun ini.

“Harapannya masyarakat bisa mudik dengan aman apalagi Stasiun Senen melayani cukup banyak, bisa mencapai 26 ribu penumpang. Petugas PT Kereta

Api juga harus memberikan pelayanan yang baik dan nyaman kepada masyarakat,” kata Ketua DPR disela-sela kunjungan di Senen, Jakarta, Selasa (7/7/15).

Dalam peninjauan tersebut ia juga berdialog dengan sejumlah calon penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran. Politisi Fraksi Partai Golkar ini meyakini dengan persiapan yang matang maka arus mudik dengan menggunakan moda transportasi kereta api akan

berlangsung aman, tenang dan jadwal keberangkatan juga tepat waktu.

Pada bagian lain Novanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Menteri Perhubungan yang aktif memantau langsung pelayanan arus mudik di lapangan. “DPR menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang turun langsung memantau arus mudik di Stasiun Kereta Api Senen ini,” tutur dia.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang mendampingi dalam kunjungan tersebut menjelaskan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dengan kereta api cenderung meningkat. Ia mengatakan akan terus memantau perkembangan arus mudik di titik-titik keberangkatan yang tersebar di seluruh tanah air.

“Sore ini saya memantau pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan mudik dengan kereta api, pelayanan harus ditingkatkan. Laporan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan ada kenaikan penumpang transportasi udara sebesar 3 persen, angkutan laut sebesar 2 persen, sedangkan untuk angkutan darat mengalami penurunan sebesar 5 persen,” ujarnya. (as) foto: denus/parle/hr

Ketua DPR: Hormati Putusan MK Soal Petahana

Ketua DPR RI Setya Novanto menyerukan semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dihapusnya larangan keluarga petahana untuk ikut mencalonkan

diri dalam pilkada. Ini babak baru dalam menghadapi pilkada serentak pada Desember 2015.

“Saya harapkan seluruh masyarakat untuk tenang dan mengikuti apa yang

sudah diputuskan MK ini. Dan saya yakin dengan putusan ini semuanya berjalan dengan baik. Seluruh daerah sudah punya calon untuk pilkada. Kalau seperti itu putusannya kita harus hormati dan mengikuti,” kata Novanto pada Kamis malam di DPR (8/7).

Sebelumnya, sidang MK yang dipimpin Ketua MK Arif Hidayat telah membatalkan pasal 7 huruf r UU No.8/2015 tentang Pilkada yang isinya



Ketua DPR RI Setya Novanto

melarang ada konflik kepentingan dengan petahana. Dengan putusan MK ini, keluarga dan kerabat petahana

bebas mencalonkan diri untuk ikut serta dalam kontestasi pilkada.

“Dengan keputusan MK ini semua harus mengikuti, tidak terkecuali. Semua peserta pilkada bisa mengikuti secara seksama,” tambah Novanto lagi. Betapa pun putusan MK bertentangan dengan DPR, menurut politisi Partai Golkar itu, MK sebagai lembaga terhormat harus dihargai dan diapresiasi. “Kita tidak bisa lagi meneruskan (aturan soal petahana). Sebaliknya, kita harus ikuti dan mengapresiasi apa yang diputuskan oleh MK,” ucapnya.

Novanto yang ditemui wartawan usai acara Buka Puasa Bersama Pimpinan DPR RI dengan Pemimpin Redaksi dan Koordinator Wartawan Parlemen, ingin agar insan pers juga ikut menjaga kesejukan berdemokrasi

di daerah. Acara ini sendiri merupakan bentuk silaturahmi Pimpinan DPR dengan pers untuk menyamakan persepsi soal demokrasi dan DPR.

“Buka puasa bersama dengan para wartawan merupakan bentuk silaturahmi antara Pimpinan DPR dengan insan pers. Ke depan kita tingkatkan ikatan batin bersama. DPR dan wartawan sendiri ingin lembaga DPR makin baik dan mutu demokrasi juga semakin terjaga. Kita harapkan hubungan ini tetap terpelihara. Bukan untuk kepentingan DPR, tapi kepentingan wartawan itu sendiri, supaya bisa semuanya memberi arti. Wartawan bisa memberikan sumbangsih untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan,” harapnya.

(mh) foto: denus/parle/hr

Ketua DPR Tinjau Kesiapan Angkutan Lebaran di Pelabuhan Tanjung Priok



Ketua DPR bersama Pimpinan Komisi V DPR berdialog dengan Petugas di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menjelang Lebaran 1436 Hijriyah, Ketua DPR bersama dengan Pimpinan Komisi V DPR, Selasa (7/7) meninjau kesiapan angkutan lebaran di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Setibanya di lokasi, Ketua DPR langsung berdialog dengan petugas yang berada di pelabuhan tersebut.

Dalam dialog, Setya Novanto menanyakan bagaimana sistem koor-

dinasi terkait dengan bongkar muat yang sempat membuat Presiden Jokowi marah, karena lamanya proses bongkar muat barang yang terjadi di pelabuhan ini.

“Kunjungan ini, dalam rangka untuk melihat persiapan pelayanan mudik lebaran dengan menggunakan angkutan laut, dan kami juga mendapatkan laporan mengenai situasi ekspor

yang mengalami penurunan sebesar 30 persen. Selain itu kesiapan sarana prasarana seperti toilet, mushola, serta ruang tunggu para calon penumpang yang akan menggunakan transportasi kapal laut,” jelas Setya Novanto.

Pimpinan DPR juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang beberapa waktu lalu meninjau kesiapan dan proses bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok ini.

“Saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah meninjau alur ekspor yang berlangsung di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Harus ada koordinasi antara kementerian terkait seperti kementerian perhubungan, kementerian perdagangan, untuk membahas banyaknya dokumen tentang ekspor yang harusnya bisa selesai sehari, namun selama ini harus memakan waktu selama tiga hari. Masalah ini harus secepatnya diselesaikan,” tandas Novanto.

Setelah memantau kesiapan angkutan laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Ketua DPR beserta rombongan menuju stasiun Pasar Senen Jakarta, untuk melihat kesiapan transportasi kereta api menjelang lebaran ini (as/

foto:denus/parle/hr

Rapat Konsultasi Gabungan Bahas Pilkada Serentak



Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Baswaslu Muhammad, dan Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman

DPR dan pemerintah menggelar rapat konsultasi gabungan terkait rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Sesuai rencana, pilkada serentak itu akan dilangsungkan pada 9 Desember 2015.

Rapat konsultasi tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya persiapan Pilkada harus matang agar dapat berjalan lancar. “Penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 memerlukan persiapan yang baik untuk memastikan pilkada berjalan aman, demokratis, efektif, jurdil dan luber,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (6/7) di ruang

Pansus C Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.

Menurut Fadli usulan revisi Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi juga didukung oleh DPR. Sebab, itu untuk mengakomodasi kesulitan Mahkamah Konstitusi mengurus sengketa pilkada. “Terhadap usulan perubahan kedua atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK berdasarkan inisiatif anggota DPR khususnya mengenai usulan penambahan durasi penyelesaian sengketa pilkada di MK dari 45 hari kalender menjadi 60 hari kerja akan di proses sesuai dengan mekanisme berlaku,” terangnya.

Fadli menambahkan DPR mendesak pemerintah untuk segera menambah kekurangan anggaran pengamanan pilkada. Selain itu, rapat konsultasi bakal dilakukan kembali jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pilkada.

“Terhadap kekurangan anggaran pengamanan Pilkada serentak 2015 sebesar kurang lebih Rp 564 miliar, meminta Mendagri berkoordinasi dengan Pemda. Disepakati diagenda pertemuan konsultasi lanjutan sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dari DPR hadir Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, dan seluruh pimpinan fraksi DPR. (as)/foto:jaka/parle/hr

Ketua DPR Terima Dubes Jepang

Ketua DPR Setya Novanto didampingi Sekjen DPR Winantingtyastiti dan staf ahli Darul Siska serta pejabat Setjen DPR Senin (6/7) di ruang kerjanya Lantai III Gedung Nusantara III, Senayan, menerima kunjungan kehormatan Dubes Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki.

Kunjungan tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang beberapa waktu lalu. Menurut Dubes Yasuaki Tanizaki, Presiden Jokowi dan PM Jepang telah menandatangani MoU mencakup tiga hal yaitu bidang pertahanan, perdagangan dan masalah investasi.

Ketua DPR mengemukakan, beberapa investor Jepang akan menindaklanjuti MoU tersebut khususnya mendukung program pemerintah Jokowi yaitu Poros Maritim Dunia. “Ini sangat diapresiasi karena sama-sama negara maritim. Selain itu peningkatan investasi juga infrastruktur khususnya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung,” katanya.

Khususnya KA cepat Jakarta-Bandung ini, Dubes Yasuaki menyatakan, Jepang siap membantu pembangunan proyek ini karena negara matahari terbit ini sangat unggul teknologinya. Sementara untuk peningkatan investasi telah disambut baik pengusaha Jepang dimana dalam waktu hanya 4 bulan tahun 2015 ini sudah menginvestasikan 3,4



Ketua DPR Setya Novanto berjabat tangan dengan Dubes Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki

juta US dolar di Indonesia.

Kepada Ketua DPR, Dubes Jepang berjanji akan meningkatkan hubungan antar parlemen to parlemen dengan menggelar kunjungan timbalbalik antar Ketua DPR dan Ketua



Parlemen Jepang. “Ini akan disampaikan kepada PM Jepang sehingga peningkatan kerja sama dan saling kunjung kedua parlemen dapat segera dilakukan,” katanya.

Dalam rangka peningkatan investasi, Parlemen dan Pemerintah terus mengadakan pembahasan-pembahasan dalam rangka memberikan kemudahan bagi investor Je-

pang dengan menurunkan PPH dan PPN. Banyaknya investor yang masuk diharapkan akan meningkatkan jumlah industri yang pada gilirannya akan meningkatkan pajak yang sekarang ini pemasukannya belum mencapai target seperti yang direncanakan. (mp)/foto:denus/parle/hr

Ketua DPR Terima Audiensi Imes

Ketua DPR Setya Novanto menerima audiensi direksi Indonesia Messenger (Imes). Imes merupakan aplikasi messenger (perpesanan) buatan Indonesia. Dalam audiensi ini, Novanto didampingi Ketua BURT DPR Roem Kono, Anggota Komisi I DPR Andi Rio Idris Padjalangi, dan Anggota Komisi IV Robert Joppy Kardinal.

Dalam pertemuan itu, Novanto mempertanyakan perkembangan dan respon mengenai aplikasi messenger yang diklaim satu-satunya yang dibuat oleh anak bangsa. Mengingat, Politisi F-PG ini juga menghadiri *launchingnya*, beberapa waktu yang lalu.

“Berapa penggunanya?” tanya Novanto di ruang rapat kerjanya, Gedung Nusantara III, Jumat (3/07/15).

Managing Director Imes Sonny J Tendean mengatakan sampai saat ini setidaknya sudah lebih dari 20 ribu *downloader* (pengunduh). Setelah *launched* pada Februari 2015 lalu, Sonny mengklaim respon masyarakat sudah cukup baik.

“Banyak permintaan agar Imes dikembangkan lagi. Kami menargetkan 20 juta *user* (pengguna),” yakin Sonny.

Sonny menjelaskan, Imes adalah aplikasi messenger (perpesanan) buatan



Ketua DPR Setya Novanto menerima audiensi Direksi Indonesia Messenger (Imes)

anak bangsa, sebagai solusi dan alternatif dari maraknya aplikasi sejenis dari luar negeri, yang hampir menguasai seluruh market di Indonesia.

“Kami hadir menjadi alternatif. Walaupun secara teknis, hampir sama dengan aplikasi messenger lain. Namun kami memiliki keunggulan, yaitu dalam hal transfer data atau file, bisa

mencapai 250 MB, tidak ada aplikasi lain yang bisa mencapai seperti itu. Kami juga memiliki fitur pembuatan grup yang bisa menampung 2000 member,” papar Sonny.

Ia berharap, audiensi ini dapat memberi masukan terhadap Imes ke depannya. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw

DPR Dukung Duta Budaya Indonesia Ikuti Festival Perancis

Tiga penari asal Kalimantan, Jumat (3/7) memberikan nuansa berbeda di lobi Gedung Nusantara III Senayan. Mereka adalah bagian dari Duta budaya Indonesia yang akan mengikuti Festival De'Montoiere, Perancis pada 5 Juli-24 Agustus 2015 mendatang.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah yang ikut menikmati suguhan Tari Burung dari Kalimantan mengapresiasi dan ikut mendukung Duta Seni Indonesia

tersebut. Mengingat tujuan dari ke-sertaan Indonesia di acara Internasional yang diikuti oleh 12 negara dari 5 benua ini tidak sekedar menjadi ajang promosi. Melainkan juga, membawa misi diplomasi dan pesan damai dari seluruh rakyat Indonesia.

“Secara pribadi saya sangat mendukung Duta Budaya Indonesia ini untuk mengikuti event internasional ini. Saya juga mendorong sekaligus merekomendasikan beberapa teman untuk

ikut mendukung Duta Bangsa Ini,” ujar Fahri kepada wartawan dan seluruh tamu yang hadir di Lobi Gedung Nusantara III.

Fahri menambahkan, melihat penyelenggaraan festival ini yang tidak sebentar, yakni sekitar 50 hari, tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama di Perancis. Oleh karena itu ia berharap agar masyarakat dan berbagai pihak dapat ikut mendukung tim



budaya ini.

Sementara itu, Pimpinan Yayasan Mekar Pribadi, Oetari Noor Permadi sebagai sponsor yang memberangkatkan tim ini mengatakan bahwa selama 50 hari penari asal Kalimantan ini akan berkeliling di 7 kota di Perancis. Berbagai tarian tradisional dari Kalimantan akan dibawa oleh duta seni ini, diantaranya tari hudog, tari mandau, tari gantar, dan tari burung.

“Nah, yang dibawa oleh penari tadi di gedung Nusantara III dinamakan tari burung. Mengisahkan tentang peperangan untuk memperebutkan cinta burung betina. Filosofi itu juga bisa dikaitkan dengan DPR RI sebagai lembaga legislatif yang ikut “berperang” meraih simpati dari seluruh rakyat Indonesia,” jelas Oetari seraya berharap doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan Pemerintah Indonesia. (Ayu)/ foto:denus/parle/hr

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima Duta Budaya Indonesia

Pemerintah Akan Tindaklanjuti Temuan BPK

DPR mengapresiasi tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPR mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, di depan Rapat Paripurna, Selasa (7/07/15). Dalam Rapat Paripurna sebelumnya, sepuluh fraksi DPR sudah menyampaikan pandangan masing-masing fraksi.

Namun, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN) yang menjadi Pimpinan Rapat, mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengesampingkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang telah memberikan tiga kualifikasi opini terhadap Kementerian atau Lembaga. Ia berharap, seluruh K/L mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Kami mengapresiasi beberapa hal terkait tanggapan Pemerintah. Kita harapkan semuanya secara ideal menuju opini WTP. Opini WTP ini tentunya menjadi kinerja standar akuntansi kita,” kata Taufik usai rapat.

Sebelumnya dalam laporannya, Menkeu mengatakan Pemerintah berjanji akan tetap konsisten dalam melakukan perbaikan dan menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah akan membuat dan menyampaikan *action plan* yang terukur kepada BPK, 60 hari sesudah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Pemerintah.

“Untuk memastikan penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut, Pemerintah melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan secara periodik dan mendiskusikannya dengan BPK,” papar Bambang.

Bambang menambahkan, berdasarkan pemantauan BPK, Pemerintah dinyatakan telah menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi BPK, walaupun masih terdapat tindak lanjut Pemerintah yang sedang dalam proses penyelesaian.

Sementara terkait dengan temuan pemeriksaan BPK



Pimpinan DPR berdialog dengan Menkeu sesaat sebelum Paripurna

yang mengakibatkan pengecualian atas kewajaran LKPP tahun 2014, Bambang menjelaskan, Pemerintah akan menyusun pedoman verifikasi dan rekonsiliasi aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), mengembangkan sistem pelaporan ases KKKS yang terintegrasi serta melakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas aset tanah KKKS untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dicatat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Terkait permasalahan utang kepada pihak ketiga, Pemerintah akan menelusuri dan memverifikasi utang kepada pihak ketiga tersebut, dalam rangka memastikan besaran kewajiban yang layak dibayar,” imbu Bambang.

Untuk permasalahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), tambah Bambang, Pemerintah telah menyusun formulasi perhitungan SAL yang tepat, sehingga tidak terdapat lagi selisih

antara nilai SAL dengan catatan fisik kas. Selanjutnya, Pemerintah akan menyusun sebuah ketentuan formal mengenai mekanisme pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi kas antara catatan kas dan nilai fisik kas.

Bambang menyatakan, Pemerintah juga sependapat dengan fraksi-fraksi DPR terkait perlunya perbaikan laporan keuangan dan upaya strategis untuk peningkatan Opini atas LKPP dan LKKL yang belum memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah secara berkelanjutan melakukan beberapa langkah.

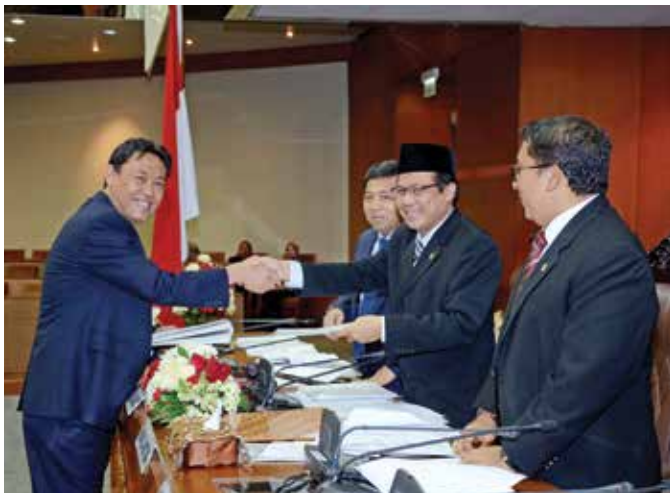
“Pertama, melalui peningkatan komitmen Menteri atau Pimpinan Lembaga maupun Pimpinan Satuan Kerja untuk meningkatkan kualitas LKKL. Berikutnya, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bagi seluruh Satuan Kerja,”

jelas Bambang.

Ketiga, tambah Bambang, melalui penyempurnaan aturan, sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta sistem akuntansi. Berikutnya, peningkatan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah di setiap Kementerian atau Lembaga dengan mengoptimalkan peran aparat pengawasan intern pemerintah. Dan yang terakhir, pendampingan dan bimbingan teknis bagi K/L yang belum mendapat Opini WTP.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah juga memberi tanggapan atas pandangan fraksi yang menyoroti mengenai asumsi dasar ekonomi makro, tingkat pertumbuhan ekonomi, hingga target penerimaan pajak. (sf) foto: andri/parle/hr

DPR Minta Penyusunan APBN Lebih Realistis



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menerima laporan Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit

Badan Anggaran DPR RI meminta agar pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 lebih realistis dan berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian saat ini.

Penekanan itu disampaikan Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit saat membacakan laporan Banggar mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2016, pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (7/07/15).

“Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya, yang juga akan menjadi penyusunan APBN,” jelas Ahmadi.

Politisi F-PG ini menambahkan bahwa tema RKP tahun 2016 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Sebagai penjabaran tema tersebut, maka disusun strategi pembangunan yang memuat beberapa sektor prioritas.

“Pertama, dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, yang terdiri dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perumahan, dan sektor mental atau karakter. Kemudian, dimensi pembangunan sektor unggulan, yang terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri,” papar Ahmadi.

Berikutnya, tambah Ahmadi, dimensi pemerataan dan kewilayahan yang terdiri dari antar kelompok pendapatan, antar wilayah yang meliputi desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur. Dimensi yang terakhir yakni kondisi perlu, yang terdiri dari kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Dalam kesempatan ini, Politisi asal Dapil Kalimantan Selatan I ini juga memaparkan asumsi dasar dalam RAPBN 2016 hasil pembahasan antara DPR dan Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi disepakati berada di angka 5,5 – 6 persen. Inflasi dipatok di angka 3,0 – 5,0 persen.

“Nilai tukar disepakati pada Rp 13.000 – 13.400 pers US\$. Sedangkan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 4,0 – 6,0 persen,” tukas Politisi yang juga menjabat Anggota Komisi XI ini.

Kemudian, tambah Ahmadi, harga minyak (ICP) disepakati sebesar 60,0 – 70,00 US\$/barel. Lifting minyak sebesar 800,0 – 830,0 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.100 – 1.300,0 ribu barel setara minyak perhari. Dengan begitu, lifting minyak dan gas bumi sebesar 1.900,0 – 2.130 ribu barel setara minyak per hari.

Disamping asumsi makro, juga disepakati target pembangunan di tahun 2016 yakni asumsi pengangguran sebesar 5,2 – 5,5 persen, angka kemiskinan 9,0 – 10,0 persen, indeks gini rasio 0,39 dan indeks pembangunan manusia (dengan perhitungan yang baru) 70,10 persen.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN) dihadiri oleh Menteri Keuangan mewakili pemerintah. Pada bagian akhir Taufik menyimpulkan laporan Banggar mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2016 dan RKP 2016 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2016. (sf)/foto:jaka/parle/iw

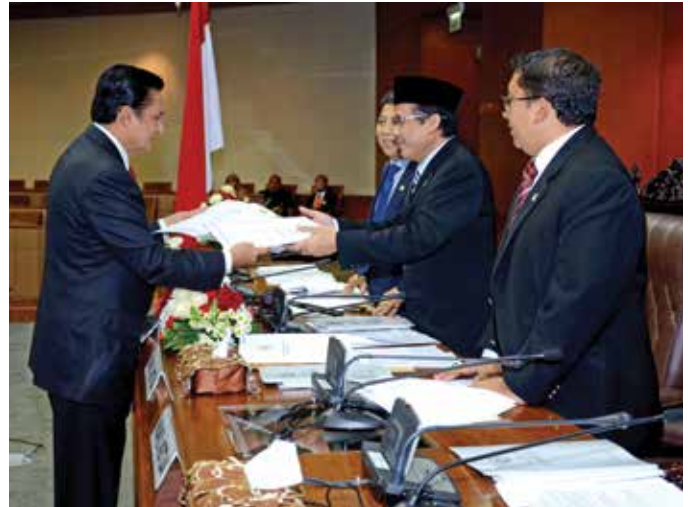
DPR Setujui RUU Pencabutan Perppu No.4/2008 tentang JPSK

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Taufik Kurniawan Selasa (7/7) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta menyetujui secara aklamasi RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) untuk disahkan menjadi UU. Dengan telah dicabutnya Perppu No.4/2008 tentang JPSK tersebut, maka tidak ada lagi kekosongan hukum.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad saat menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan RUU tentang Pencabutan Perppu No.4/2008 tentang JPSK. Sebagaimana diketahui, RUU tentang Pencabutan Perppu No.4/2008 tentang JPSK dilatarbelakangi antara lain, dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuan DPR maka harus dicabut.

Perppu yang diajukan Presiden tersebut kata Fadel, tidak mendapat persetujuan DPR. Karena itu untuk memberikan kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan UU. No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu dimaksud.

Komisi XI yang diberi tugas membahas Perppu tersebut



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menerima laporan Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad

telah menggelar Raker dengan Menteri Keuangan dan Menkumham pada tanggal 25 Juni dan 6 Juli 2015. Dalam raker tersebut Komisi XI menyetujui RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut. (mp)/foto: jaka/parle/hr



Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto mengangkat permasalahan perlindungan anak di negeri ini belum dilakukan secara maksimal, seperti terlihat dalam kasus Engeline, dan kasus-kasus terkait perlindungan anak lainnya. Termasuk belum terpenuhinya pendidikan dasar dan gizi anak di sejumlah daerah.

Karena itu, Pimpinan DPR menghimbau kepada seluruh elemen bangsa, khususnya orang tua, lembaga pendi-

DPR Tekankan Laksanakan UUPA Dengan Konsisten

dikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan aparaturnya penegak hukum, untuk bersama-sama memberi perhatian yang lebih terhadap perlindungan anak.

“Salah satu upaya bersama yang perlu dilakukan adalah melaksanakan secara sungguh-sungguh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU PA),” kata Setya Novanto pada pidato Penutupan Masa Sidang IV tahun 2014/2015, Selasa (7/7).

Sejalan dengan itu, sebagai wujud kepedulian dan simpati anggota DPR terhadap bencana yang kerap terjadi di tanah air, Ketua DPR mengusulkan agar dibuat mekanisme pengumpulan dan penyaluran sumbangan untuk masyarakat korban bencana. Sebelumnya pernah dilakukan penyaluran sumbangan dari Anggota DPR melalui pemotongan gaji untuk beberapa bencana yang terjadi, seperti bencana Merapi, Sinabung, Longsor di Banjarnegara, dan lain-lain.

Ketua DPR yang didampingi Wakil Ketua Taufik Kurniawan dan Fadli Zon juga menyatakan turut berduka atas jatuhnya Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara C-130 di Medan beberapa waktu lalu, yang telah menelan sejumlah korban jiwa prajurit TNI dan masyarakat sipil. “Kita doakan agar keluarga korban yang ditinggalkan, diberi kekuatan dan kesabaran untuk menerima cobaan yang datang dari Tuhan Maha Kuasa. Pimpinan DPR meminta supaya pemerintah memberikan bantuan terbaik bagi keluarga korban,” ungkap dia.

Sedangkan untuk mencegah agar peristiwa ini tidak terulang kembali, yang antara lain disebabkan oleh masih digunakannya pesawat-pesawat TNI berusia tua, Pimpinan DPR mendukung penuh langkah-langkah pemerintah untuk melakukan penyegaran Alutsista. (mp)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Perlu Langkah Nyata Tingkatkan Kinerja Perekonomian

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, masalah perlambatan ekonomi dan masih terjadinya pelemahan nilai rupiah yang mewarnai kinerja perekonomian nasional menjadi salah satu perhatian DPR. Untuk itu, DPR mengingatkan kembali Pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah nyata untuk mengembalikan kinerja perekonomian nasional, seperti yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Demikian ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto ketika menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang IV/2014-2015 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Terkait harga kebutuhan pokok masyarakat yang cenderung naik menjelang dan selama bulan Ramadan juga menjadi perhatian DPR. Dalam hal ini, DPR melalui komisi-komisi terkait telah meminta pemerintah untuk melakukan upaya pengendalian harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang hari raya Idul Fitri ini.

Sebagai salah satu bentuk kepedulian yang besar dari DPR atas pentingnya pengendalian harga kebutuhan pokok ini, Pimpinan DPR dan Komisi terkait telah melakukan peninjauan secara langsung ke beberapa pasar tradisional yang menjadi acuan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, DPR juga telah meminta Pemerintah untuk memberi perhatian serius terhadap kelancaran arus mudik masyarakat yang hendak merayakan



Ketua DPR Setya Novanto ketika menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang IV/2014-2015 di Gedung DPR

kan Idul Fitri di kampung halaman, diantaranya segera menyelesaikan perbaikan infrastruktur transportasi dan keamanannya guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.

“Pimpinan DPR mengingatkan perlunya kerja sama antara masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah untuk mewujudkan mudik lebaran yang tertib, aman, dan nyaman,” tegas Novanto.

Disampaikan pula bahwa Pimpinan DPR telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Papua, dan Yogyakarta melalui mekanisme kunjungan kerja Tim Pemantau. Kunjungan ini dimaksudkan

untuk mengetahui kendala yang harus mendapat perhatian dari pelaksanaan undang-undang kekhususan ketiga daerah tersebut.

Terhadap peristiwa kekeringan yang berdampak pada kerawanan pangan masyarakat, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, DPR mendorong Pemerintah untuk melakukan tindakan penanganan khusus yang dapat dikategorikan sebagai bencana. “Pemerintah perlu mengambil langkah nyata yang bersifat antisipatif untuk mencegah agar bencana kerawanan pangan ini tidak terulang kembali,” tandas Setya Novanto. (mp)/foto:naefurodji/parle/hr

Paripurna DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI

Jalan panjang Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan calon Kepala BIN dan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, sesuai mekanisme berujung pada pengambilan putusan tingkat II di paripurna. Peserta sidang secara bulat menyampaikan persetujuan terhadap hasil kerja

komisi pertahanan tersebut.

Setelah meminta persetujuan peserta rapat paripurna dan menyetujui palu tanda pengesahan, pimpinan sidang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah segera mempersilahkan dua pejabat yang baru terpilih untuk maju ke depan.

“Perkenankan kami memperkenalkan calon Kepala BIN terpilih dalam

rapat paripurna kali ini yaitu saudara Letjen (Purn) TNI Sutiyoso dan calon Panglima TNI terpilih Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk maju ke depan,” kata Fahri disambut tepuk tangan peserta sidang di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/15).

Fahri didampingi Ketua DPR Setya Novanto kemudian maju ke depan



Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memperkenalkan Kepala BIN dan Panglima TNI Terpilih

mimbar pimpinan, mendampingi dua calon terpilih memperkenalkan diri kepada peserta rapat paripurna. “Sambil angkat tangan, ketua,” terdengar seruan dari anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Sebelumnya Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyampaikan seluruh proses pemilihan sudah dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan, melaksanakan rapat dengar pendapat umum untuk mendengar dan mendalami visi dan misi kandidat.

Ia secara khusus juga menyampaikan catatan terkait Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang berdasarkan surat presiden, telah disetujui pemberhentiannya oleh DPR. “Komisi I memberikan apresiasi atas kontribusi dan capaian yang telah diraih. Kami menilai positif atas kinerja Jenderal Moeldoko,” tutur dia.

Selanjutnya Pimpinan DPR segera menyurati presiden untuk menyampaikan persetujuan yang telah berhasil ditetapkan dalam rapat paripurna dewan. (iky) foto: jaka/parle/hr

Diwarnai Catatan, DPR Sahkan 6 Calon Hakim Agung

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fahri Hamzah Jumat (3/7) menyetujui dan mengesahkan enam calon Hakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial. Sebelumnya keenam calon hakim agung tersebut menjalani fit & proper test oleh Komisi III DPR.

Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin dalam laporannya menyebutkan bahwa Komisi III DPR telah melaksanakan fit and Proper Test dan akhirnya disetujui secara musyawarah mufakat oleh para anggota Dewan, meski ada beberapa catatan.

Keenam calon Hakim Agung yang lolos *Fit And Proper Test* adalah, H. Suhardjono, SH MH, Dr. H. Wahidin, SH MH, Dr. H. Sunarto, SH MH, Maria Anna Samiyati, SH MH, Yosran, SH MH dan Dr. HA Mukti Arto, SH M.Hum.

Azis mengemukakan, proses Uji Kelayakan terhadap calon Hakim Agung ini, merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, DPR juga turut melakukan Uji Kelayakan sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi antara lembaga negara.

Menurut Azis, terdapat enam Fraksi, yaitu Fraksi PDI P, Fraksi PG, FPKS, FPP, F-Nasdem dan F-Hanura menyetujui secara bulat keenam calon Hakim

Agung untuk di tetapkan dalam Rapat paripurna.

Sedangkan tiga Fraksi lainnya juga memberikan persetujuan namun dengan catatan. FPD dalam pandangannya, memberikan catatan bahwa enam Calon Hakim Agung harus mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi kelembagaan dan menjaga kualitas putusan yang berbasis keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan demi terciptanya MA sebagai lembaga peradilan yang agung.

Fraksi PAN memberikan catatan, semua substansi dalam *fit and proper test*, baik berupa pertanyaan, saran, pendapat, kritik, maupun masukan dari masyarakat luas menjadi catatan yang sangat penting bagi calon Hakim Agung.

Calon Hakim Agung diharapkan dapat meningkatkan kinerja Mahkamah Agung terutama dalam upaya pembenahan dan pemingkatan kualitas profesionalisme para hakim di seluruh pelosok Indonesia. Sementara Fraksi Partai Gerindra hanya menyetujui tiga nama dari enam Calon hakim Agung yaitu, Dr. H. Sunarto, SH, MH, Yosran, SH, MH, dan Dr. H. A Mukti Arto, SH, M.Hum.

Azis Syamsudin mengharapkan agar calon Hakim Agung terpilih dapat menjadi Hakim Agung yang mampu



Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin

meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Agung sebagai Lembaga peradilan tertinggi sekaligus benteng terakhir bagi pencari keadilan. (Spy)/ foto:iwan armanias/parle/hr



Seluruh Fraksi DPR Setuju Pertanggungjawaban APBN 2014

Walaupun disertai beberapa catatan, seluruh fraksi DPR menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara II, Rabu (1/07/15) itu, secara umum, sepuluh fraksi mengkritisi terkait asumsi makro, pendapatan dan belanja negara, dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pandangan fraksinya, Fraksi PDI-Perjuangan yang diwakili Daniel Lumban Tobing meminta agar APBN 2014 harus dikelola secara efisien, ekonomis, dan transparan. Temuan BPK dalam audit LKPP 2014 menunjukkan bahwa APBN 2014 belum dikelola secara ekonomis. Namun di satu sisi, FPDI-Perjuangan mengapresiasi Pemerintah karena berdasarkan hasil reviu APBN 2014, Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal.

Sementara itu Zulfadhli yang membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar meminta keseriusan dari Pemerintah untuk melakukan perbaikan pada pengelolaan keuangan negara, dan memprioritaskan penuntasan temuan BPK yang masih berulang dari tahun ke tahun.

Bambang Haryo Soekartono sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra menilai kualitas kebijakan fiskal pemerintah yang dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan ekspor pada 2014 semakin memburuk. "Utang swasta dan utang publik jumlahnya sudah menggunung. Pertumbuhan utang swasta yang terus meningkat, memberi sinyal negatif karena dibayangkan ancaman default jika rupiah terus merosot ke titik terburuknya," jelas Bambang.

Pandangan Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Marwan Cik Asan meminta kepada Pemerintah untuk terus memantapkan proses perencanaan anggaran yang jelas dan terukur. Terkait dengan hasil pemeriksaan BPK pada LKPP 2014, FPD meminta Pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK itu.

Juru bicara Fraksi PAN, Taufan Tiro, dalam pandangan fraksinya meminta Pemerintah untuk membuat skala prioritas serta klasifikasi masalah yang harus ditangani secepatnya, berdasarkan hasil temuan BPK. Penting pula melakukan skala prioritas penanganan Kementerian atau Lembaga yang tidak mengalami perkembangan opini laporan dari BPK. "Perlu ketegasan Pemerintah dalam memberlakukan sistem rewards and punishment bagi K/L yang mendapat opini Disclaimer dalam RAPBN 2016 mendatang," kata Taufan.



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Saat Menerima Pandangan Fraksi

Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai juru bicara Fraksi PKB menilai Pemerintah belum optimal dalam melakukan perbaikan LKPP 2014, karena masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. FPKB mendesak Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan dalam mengatasi temuan pemeriksaan BPK, dan menindaklanjuti saran BPK terhadap LKPP 2014.

Pandangan Fraksi PKS yang dibacakan Abdul Kharis Almasyari memandangi kualitas akuntabilitas keuangan negara mengalami penurunan. FPKS mendesak Pemerintah untuk terus meningkatkan penyajian LKPP yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Pandangan Fraksi PPP yang dibacakan Irna Narulita meminta kepada K/L yang hanya dapat merealisasikan Belanja Barang dan Modal kurang dari 85 persen agar dilaporkan kepada Badan Anggaran dan Komisi DPR terkait.

Donny Imam Priambodo mewakili Fraksi Partai Nasdem meminta Pemerintah agar cermat dalam penghitungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan faktor yang mempengaruhi faktor penghitungannya. F-Nasdem menghargai usaha perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan Pemerintah.

Menutup seluruh pandangan fraksi, Fraksi Partai Hanura yang diwakili Ferry Kase meminta Pemerintah untuk membuat aturan atau payung hukum yang kuat, yang ditetapkan melalui suatu peraturan maupun regulasi terhadap beberapa pelanggaran yang terjadi, sehingga kesalahan tersebut tidak terjadi berulang-ulang. (sf)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Komisi VII DPR Dukung Perubahan Rezim Perijinan Pertambangan

Tumpang tindih perizinan masih menjadi persoalan dalam sektor pertambangan, bahkan terkait perpanja-

ngan ijin Freeport ada usulan perubahan izin dimana dulunya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan

Khusus (IUPK).

"Yang perlu diperhatikan jika IUPK rohnya maka pemerintah bisa men-



cabut izin perusahaan tersebut apalagi terjadi wanprestasi,” ujar Anggota DPR dari Fraksi PPP Joko Purwanto kepada Parlemen, di Gedung DPR, Rabu malam, (8/7).

Dalam kontrak karya, klausul perjanjian ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pertambangan. Sedangkan dalam IUPK, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk mengatur klausul dan memberikan izin kepada perusahaan pengelola tambang. Pemberian IUPK dilakukan setelah Freeport, selaku pemegang kontrak karya, melakukan divestasi. Perbedaan IUPK dengan kontrak sebelumnya terletak pada proses perjanjian eksplorasi dan eksploitasi tambang.

Menurutnya, saat ini telah terjadi krisis peraturan, dimana adanya tumpang tindih Permen dengan PP terkait perjanjian pertambangan. “Kita sedang mencari terobosan persoalan dilapangan dengan mengundang kembali Dirjen Minerba,” jelasnya.

Terkait RUU Minerba, dia mengatakan, RUU ini telah masuk didalam Prolegnas 2015 dan akan segera dibuat proses legislasinya. Namun dalam konteks UU, lanjutnya, perlu disisir kembali aturan yang saling tumpang tindih terkait Minerba.

“Memang ada kecenderungan adanya perubahan rezim dari awalnya kontrak karya akan menjadi IUPK nanti, karena memang apabila kontrak karya atau PKP2B royalti untuk daerahnya kecil sekali,” jelasnya.

Dia menambahkan, DPR bersama pemerintah akan mencari jalan keluar terkait persoalan pertambangan, dengan memberikan input masukan yang positif dalam RUU Minerba nanti. “Namun ini semua ada proses politik yang panjang, dan ada saling tarik ulur kepentingan,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, dia mengatakan, persoalan Freeport memang tersandung UU. artinya ada



Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto

aturan yang saling tumpang tindih antara Permen, dan PP yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Terkait PP memang ada di domain eksekutif, khusus RUU Minerba dan Migas memang sudah menjadi rencana DPR untuk segera melakukan revisi RUU itu,” jelasnya.

(Si) Foto: naefuroji/parle/iw



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir

Komisi VI DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan sejumlah BUMN. Program sosial BUMN ini ternyata banyak menuai masalah hukum.

“Komisi VI DPR telah menyepakati usulan pembentukan Panja untuk

Komisi VI Bentuk Panja PKBL

mengawasi proyek PKBL dari BUMN. Panitia akan dibentuk setelah masa reses DPR,” ungkap Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir, Jumat (3/7). Proyek PKBL yang dikenal juga dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini, ternyata teknis penentuan program dan penyalurannya telah melanggar Pasal 88 UU BUMN.

Hafisz mengungkapkan, beberapa waktu lalu ada proyek sawah fiktif dari bantuan PKBL. Dan BUMN yang terseret dalam pusaran kasus tersebut adalah BNI, BRI, PT. Askes, PT. Pertamina, PT. Pelindo II, PT. Hutama Karya, dan PT. PGN. “Mereka menghimpun dana untuk mencetak sawah guna membantu program swasembada

pangan di zaman Meneg BUMN periode yang lalu,” terang politisi PAN itu.

Ditambahkan Hafisz, kasus PKBL waktu itu untuk membuka 100 ribu hektar sawah baru di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Namun cetak sawah baru ternyata tak pernah ada. Akibat kasus itu, semua peraturan menyangkut PKBL sudah dibekukan, karena dianggap menyimpang dari UU.

“Nanti Panja PKBL juga bakal mengawal pembentukan aturan teknis dan diharapkan Kementerian BUMN intensif berkoordinasi dengan Komisi VI,” tutup Hafisz. (mh)/foto:iwan armanias/parle/hr

Aturan Baru JHT Rugikan Pekerja

Aturan baru pengambilan dana jaminan hari tua (JHT) sangat merugikan para pekerja. Dalam aturan yang baru, pekerja baru bisa mencairkan dana JHT setelah 10 tahun. Padahal, sebelumnya bisa dicairkan hanya dalam 5 tahun. BPJS Ketenagakerjaan menuai kritik termasuk dari parlemen.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengaku terkejut dengan

munculnya peraturan pemerintah soal ini. Dahulu ketika masih bernama JAMSOSTEK, dana JHT bisa diambil setelah 5 tahun. Kini setelah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan malah 10 tahun. “Terus terang saya kaget juga ketika mendapat informasi bahwa pengambilan dana JHT para pekerja itu mundur dari 5 tahun menjadi 10 tahun,” ungkapnya kepada pers sebelum mengi-

kuti Rapat Paripurna DPR, Jumat (3/7).

Seperti diketahui, dalam peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah itu, dana JHT baru bisa diambil seluruhnya setelah pekerja berusia 56 tahun. Sementara untuk persiapan hari tua, dana yang bisa diambil hanya 10 persen dari saldo. Dan untuk pembiayaan perumahan, saldo yang bisa diambil 30 persen.

“Terus terang ini mengingkari amanah UU BPJS Ketenagakerjaan. Saya salah satu anggota pansusnya. Di UU BPJS itu dikatakan, peserta lama ketika bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh berkurang benefitnya. Kalau 10 tahun merugikan bagi para pekerja. Sehingga menjadi pertanyaan dari kami apa dasar BPJS Ketenagakerjaan membuat perubahan peraturan ini.”

Iuran BPJS Ketenagakerjaan, sambung politisi PPP itu, berbeda dari asuransi komersial biasa. Asuransi

komersial dalam waktu 1 atau 2 tahun bisa diambil. “Ini malah justru lebih buruk daripada asuransi biasa. Adanya BPJS Ketenagakerjaan justru agar nasib pekerja jadi lebih baik. Kami akan tanyakan ini kepada Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Okky.

Karena peraturan pemerintah ini sudah dikeluarkan, baiknya ada masa transisi lebih dulu untuk mendengar masukan dan pandangan dari semua *stakeholder*. Sosialisasinya pun belum masif dilakukan pemerintah. (mh)/

foto:jaka/parle/hr



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati

DPR Apresiasi Kerja Pertamina Jelang Lebaran 2015



Anggota Komisi VII DPR Mohammad Suryo Alam

Anggota Komisi VII DPR Mohammad Suryo Alam dari Partai Golkar mengapresiasi positif kerja Pertamina dalam menghadapi Lebaran tahun ini.

“Komisi VII DPR secara umum melihat, pemerintah maupun Pertamina telah mempersiapkan diri menghadapi melonjaknya permintaan BBM menjelang lebaran,” jelasnya saat

acara silaturahmi Komisi VII DPR dan mitra kerja di DPR RI, Rabu malam, (8/7).

Menurutnya, Pertamina sudah mempersiapkan dua tangki BBM di Tuban dan Balongan apabila terjadi peningkatan permintaan BBM nanti. “Kita lihat mereka sudah mempersiapkan diri, Pertamina menyiapkan dua tangki di tuban dan balongan, dimana di Tuban awalnya 350 ribu KL dapat ditingkatkan menjadi 450 ribu KL, namun kapasitas tangki itu bahkan bisa mencapai 1 Milyar KL,” jelasnya.

Dia menambahkan, Pertamina juga sudah mengantisipasi siklus kebutuhan solar dan premium. Pasalnya, pada H-2 DAN h+3 Kendaraan berat seperti truk sudah tidak boleh lewat sehingga otomatis konsumsi solar dan industri akan turun dan tangki tersebut juga dapat diisi Premium.

Pada kesempatan itu, dirinya menyoy-

roti kesiapan Pertamina menghadapi lonjakan permintaan BBM khususnya di Tol Cipali. Pasalnya baru satu pom bensin yang berfungsi dari yang direncanakan empat pom di wilayah itu. “Mereka berjanji akan menuntaskannya pada minggu ini, yang utama perlu adanya sebaran titik yang diperluas dan adanya skenario *back up* pusat tangki di Tuban dan daerah penyangganya,” paparnya.

Dia menambahkan, Pertamina harus menyusun jadwal dan lokasi sebaran permintaan BBM yang akan meningkat saat mendekati Lebaran nanti. “Perlu diperhatikan antisipasi jadwal dan lokasi sebaran BBM karena memang adanya jalan tol baru, selain itu perlu penambahan POM baru di daerah Jateng yang akan dibanjiri para pemudik nanti, khususnya di sekitar tol,” tambahnya. (sugeng) Foto: Naefuroji/

parle/od

Komisi IV Pantau Harga di Pasar Induk Cibitung

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk memantau stabilitas harga sejumlah komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat Lebaran nanti di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Dari kunjungan tersebut berhasil dihimpun sejumlah masukan, upaya pemerintah melakukan operasi pasar cukup berhasil mencegah spekulasi bermain harga.

“Kami melihat dalam kunjungan ini ada kesiapan peme-



Tim Kunker Komisi IV DPR meninjau Pasar Induk Cibitung, Bekasi

rintah dalam mengawal dinamika harga menjelang lebaran nanti. Tadi kita berdialog dengan sejumlah pedagang hortikultura, beras nampaknya harga cukup terkendali. Memang ada yang naik seperti cabe, tapi ada yang turun yaitu bawang,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron kepada wartawan di Cibitung, Jawa Barat, Rabu (8/7/15).

Ia menekankan kondisi ini harus terus dijaga pemerintah dengan catatan stabilisasi bukan hanya menjaga harga sampai pada tingkat tertentu tetapi bagaimana menjaga harga sesuai daya beli masyarakat. Komisi IV menurut politisi Fraksi Partai Demokrat ini akan terus memantau ketersediaan pangan sampai pada H+7 nanti.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota tim kunker Komisi IV Oo Sutisna mengingatkan pemerintah agar jangan hanya terfokus pada upaya menjaga stabilitas menjelang lebaran. Sejumlah kasus menunjukkan pasca lebaran H+7

harga cenderung naik karena pasokan di pasar berkurang.

“Harusnya pemerintah jangan memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu bermain pada waktu yang lengah seperti pada H+1 sampai H+7 tadi, karena orang dikiranya kebutuhan hanya untuk lebaran, kita sampaikan tadi kepada pemerintah untuk menjaga kemungkinan ini,” ujar dia.

Dalam kesempatan kunjungan ke Pasar Cibitung ini, Tim Kunker Komisi IV bertemu dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan rombongan yang juga sedang melakukan pantauan lapangan. Ia berjanji akan melakukan pantauan sampai H+7 nanti.

Kunker Komisi IV kali ini disamping memantau harga di Pasar Cibitung, juga meninjau kesiapan PT Berdikari dan Bulog dalam mendukung operasi pasar pemerintah. Tim juga melakukan peninjauan budi daya ikan air tawar di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jabar. (iky) foto:iky/parle/ray

DPR Ingin Pastikan Stok BBM dan Listrik Aman

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menegaskan, dewan ingin memastikan ketersediaan BBM dan listrik selama bulan puasa dan lebaran dalam posisi aman. Untuk itu Komisi VII telah mengundang Pertamina membahas ketersediaan BBM dan Elpiji.

“Secara nasional stok BBM maupun Elpiji mencukupi. Dalam kunjungannya ke terminal di Tuban sebagai terminal besar yang menerima BBM dari Singapura maupun kilang dalam negeri, dinyatakan stok cukup,” ungkap Kardaya saat berbincang dengan wartawan Selasa (7/7) siang.

Terkait kelangkaan elpiji, Wardaya mengaku sudah berkordinasi dengan Pertamina dan dinyatakan sebetulnya tidak ada masalah karena stok cukup. Sedangkan ketersediaan energi listrik,



Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika

berdasarkan informasi yang diterima dari PLN tidak ada masalah. Pihaknya telah meminta PLN agar selama bulan puasa dan lebaran tidak terjadi pemadaman. “PLN menyanggupi dan dalam posisi aman,” tekan politisi Gerindra

ini.

Komisi yang membidangi energi dan lingkungan hidup ini juga memberi perhatian khusus pada tol Cipali karena tol terpanjang di Indonesia masih minim SPBU, baru ada pada jarak 60-70 km. Masalah ini menjadi kekhawatiran Komisi VII dan minta Pertamina untuk benar-benar memberi perhatian serius soal penambahan SPBU ini.

“Kalau ada mobil yang kehabisan BBM di ruas tol tentu akan mengakibatkan macet bahkan kecelakaan. Kami minta Pertamina mengupayakan SPBU mobil (bergerak), dengan mobil tangki yang langsung diisikan ke mobil,” katanya.

Menurut Wardaya, masalah ini perlu koordinasi dengan kepolisian untuk menjemput bola, manakala ada kendaraan mogok karena kehabisan BBM. “Ada satu saja kendaraan yang mogok bisa berakibat fatal,” tambahnya. (mp)/ foto:naefurodji/parle/hr

DPR Harapkan Penerimaan Pajak Dioptimalkan

Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Diharapkan ada kebijakan agar para wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan, usai pertemuan dengan jajaran Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR, di Yogyakarta, Rabu (8/07/15).

“Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yogyakarta harus optimalkan lagi penerimaan pajaknya. Mereka harus lebih intens lagi melakukan pendekatan, komunikasi, dan sosialisasi terhadap masyarakat Yogyakarta yang sudah

patuh menyampaikan SPT Tahunannya, juga patuh dalam mengisi kontennya, yakni ada nilai pajak yang dibayarkan,” kata Marwan.

Pasalnya, tambah Politisi F-Demokrat ini, jika wajib pajak hanya melaporkan SPT Tahunan saja, namun tidak ada konten pajak yang dibayarkan, DJP hanya mendapatkan data wajib pajak saja, tidak mendapat pendapatan untuk negara.

Marwan mengakui, SPT Tahunan yang dilaporkan wajib pajak di Yogyakarta memang cukup baik. Bahkan, ia melihat setidaknya 98 persen wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan. Namun untuk bidang UMKM, nilai Marwan, dari 84 ribu wajib pajak, baru 20 ribuan wajib pajak yang membayar pajak. Pelaporan SPT Tahunan juga masih di kisaran



Wakil Ketua Komisi IX DPR Marwan Cik Asan menerima cinderamata dari Wakil Gubernur DIY

80 ribuan.

“Tetapi konten dari SPT Tahunan itu nihil, jadi secara pendapatan belum maksimal,” imbuh Politisi asal Dapil Lampung II, yang sekaligus menjadi Ketua Tim Kunker Komisi XI DPR ini.

Hal berbeda diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Henky Kurniawan. Ia melihat realisasi penerimaan pajak di Yogyakarta sudah cukup bagus. Namun ia juga mendorong Kanwil DJP Yogyakarta untuk tetap meningkatkan kinerjanya.

“Secara umum sudah cukup bagus. Namun untuk mencari prestasi itu kan memang ukurannya terus menerus untuk mencapai target yang ditetapkan,” nilai Henky.

Politisi F-PDI Perjuangan ini juga melihat, angka kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta itu relatif sudah cukup bagus dibandingkan daerah lain. Walaupun di satu sisi penerimaan pajak secara nasional menurun, namun ia yakin Kanwil DJP

Yogyakarta dapat mencapai targetnya.

“Penyelenggara pajak ingin berprestasi lebih bagus lagi, dan itu sangat positif. Di sini kami lihat sudah luar biasa bagus. Saya melihat ada satu optimisme untuk tercapai dari yang ditargetkan oleh pusat. Walaupun dalam kondisi berat, tapi saya lihat ini bagus,” kata Politisi asal Dapil Jawa Timur ini.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Edison Betaubun (F-PG). Ia melihat penerimaan pajak sudah cukup bagus. Ia berharap penerimaan pajak ini terus meningkat.

“Memang Provinsi Yogyakarta cukup bagus dari sisi perpajakan maupun kondisi ekonominya. Berarti memang kinerjanya cukup bagus. Kita berharap daerah lain dapat meningkatkan kinerjanya seperti Yogyakarta,” harap Politisi asal Dapil Maluku ini.

Sementara sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Kemenkeu Provinsi DI Yogyakarta, Rudi Bastari mengatakan, selama kurun waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2014, penerimaan Kanwil DJP DIY selalu mengalami pertumbuhan. Walaupun sedikit ada penurunan di tahun 2014, diakibatkan salah satunya oleh adanya penurunan setoran dari wajib pajak besar di sector Industri Pengolahan, yaitu PPh Badan Impor dan PPN Impor.

Untuk tahun 2015, Rudi melaporkan, sampai dengan 6 Juli 2015, capaian penerimaan pajak sudah mencapai angka 32,72 persen atau Rp 1,476 triliun, dari target sebesar Rp 4,514 triliun. Dengan angka pertumbuhan dicatat sebesar 16,33 persen.

Kunker Komisi XI ini juga diikuti oleh I.G.A Rai Wirajaya, Hendrawan Supratikno, Amin Santono, Muhammad Hatta, Donny Ahmad Munir, Abdul Kharis Almasyhari, Sumail Abdullah, dan Anna Muawanah. (sf) foto: sofyan/parle/hr

DPR Belum Terima Surat Pencabutan Revisi UU KPK



Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo dalam Forum Legislasi Pressroom DPR

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Subagyo, mengaku belum mendapat keputusan resmi dari pemerintah terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk segera mencabut revisi Undang-Undang Komisi Pemberan-

taan Korupsi (UU KPK).

“Kalau soal itu (penarikan revisi UU KPK-red) saya baru mendengar lisan dari pernyataan Menkumham Yasona H Laoly, kalau Presiden Jokowi minta itu segera dicabut. Tapi persoalannya bagi kami selembur surat pun kami belum terima gimana mau mencabut,” kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7), dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk Revisi UU KPK, bersama pakar tindak pidana pencucian keuangan (TPPU) dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih, dan penasihat KPK Abdullah Hehamahua.

Politikus Partai Golkar itu menilai sangat aneh dengan maju mundurnya revisi UU KPK yang dibawa pemerintah. Pasalnya, kata dia, sejak awal Menkumham datang kepada DPR mengusulkan revisi UU KPK atas nama pemerintah, dan kini setelah polemik ini bergulir di masyarakat secara lisan pemerintah minta segera dicabut.

“Ini kan aneh mereka (Menkumham-red) datang ke Baleg mengusulkan revisi UU KPK atas nama pemerintah dan ini ada dalam pidatonya saat mengusulkan revisi ini. Kok tiba-tiba sekarang akan minta dicabut. Tanpa sepucuk surat resmi,” tanya Firman heran.

Untuk itu, Firman meminta jika memang pemerintah in-

gin kembali mencabut revisi UU KPK dari Prolegnas, maka segera membuat surat resmi seperti halnya pertama kali diajukan. Karena, menurutnya, DPR ini bukan seperti pabrik pembuat UU yang seandainya mengajukan dan mencabut tanpa sebuah administrasi.

“Ini kan harus ada etikanya. Pemerintah harus buat surat administrasinya karena kalau ada apa-apa nanti kami (DPR) kedepan tidak mau disalahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Yenti Ganarsih menilai revisi UU KPK tidak urgen dan lebih baik mendahulukan revisi UU KUHP dan UU KUHAP. Meski begitu, tidak masalah pula bila UU KPK nanti tidak sejalan dengan UU KUHAP.

“Dalam posisi ini, (revisi UU KPK-red) tidak urgen. Melihat KUHAP dulu. Induknya dulu, kan belum selesai. Kalau KUHAP ada, tidak apa-apa menyimpang dari KUHAP karena ini *lex specialis*,” kata Yenti.

Menurut Yenti, saat ini seharusnya DPR fokus membahas revisi UU KUHP terlebih dahulu. Draf revisi UU KUHP sudah diserahkan ke DPR namun baru akan mulai dibahas di masa sidang V DPR.

“Untuk UU KPK, saya berpikir bahwa UU terkait korupsi itu dengan semua prasarannya hanya akan sukses kalau ada semangat yang sama antara pemerintah dan DPR. Yang penting *political will* eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Menurut Yenti, kewenangan khusus KPK tak boleh di-ganggu gugat, termasuk penyadapan dan penuntutan. Terkait penyadapan, dia membandingkannya dengan kewenangan di tindak pidana khusus lainnya yaitu narkoba dan terorisme.

“Jangan alergi dengan penyadapan. Seakan-akan hanya KPK yang punya, padahal narkoba, terorisme punya. KY juga punya. Kenapa KPK tak boleh menyadap?” katanya.

KPK yang tidak memiliki SP3 juga karena ada alasan khusus yaitu agar lembaga antikorupsi itu hati-hati. Menurut Yenti, akan lebih bahaya bila KPK memiliki kewenangan SP3.

“Ada kewenangan khusus malah ada SP3, makin liar tidak? Justru itu agar KPK hati-hati. Penetapan tersangka bablas sampai pengadilan. Lebih profesional, lebih hati-hati,” ucapnya. (nt/sc) foto: rizka/parle/ry

Pemberdayaan UKM Penting Di Tengah Kelesuan Ekonomi



Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani dan Menkop UKM

Di tengah kelesuan ekonomi nasional, pemberdayaan UKM menjadi penting dilakukan oleh pemerintah. Selain untuk membangun kemandirian masyarakat, pemberdayaan ini juga untuk menyongsong pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini.

Demikian mengemuka saat acara penyerahan bantuan bagi para pelaku UKM di Klaten, Jawa Tengah, Senin (6/7). Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani, Bupati Klaten Sunarna, dan Wakil Bupati Klaten Hartini.

Dalam acara tersebut, para pelaku UKM di Klaten menerima bantuan sertifikasi hak cipta untuk produk yang dihasilkan, sekaligus bantuan permodalan. Bahkan Endang Srikarti memberi sumbangan traktor untuk petani setempat. Ini momentum berharga untuk menumbuhkan semangat dan menggairahkan ekonomi rakyat kecil di daerah.

“Harapan saya bantuan ini bisa menggalakkan pelaku

UKM sesuai dengan skilnya. Bantuan traktor untuk pertanian supaya bisa menambah *income* harian. Saya juga berharap, para pemuda yang sedang berada di perantauan, pulanglah untuk membangun daerah supaya lebih maju,” seru Endang usai pertemuan.

Sebelumnya, saat memberi sambutan di acara tersebut, Endang berharap agar para pelaku UKM tidak dipersulit untuk mengakses bantuan modal usaha. Dan pelaku UKM sendiri harus memanfaatkan bantuan tersebut untuk kemajuan ekonomi dan meningkatkan daya saing. “Kehadiran Menteri Koperasi dan UKM ke Klaten ini, untuk menjawab kegalauan rakyat kecil agar bisa bangkit kembali,” ujar poli-tisi Partai Golkar dari dapil Jateng V tersebut.

Endang sendiri menyampaikan, kehadirannya dengan mengajak sang menteri ke Klaten, dapilnya sendiri, untuk membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri para pelaku UKM. Ini pemberian perhatian yang sangat baik sekaligus ingin mengapresiasi para pelaku UKM.

Sementara itu, Menkop UKM mengatakan, di saat krisis, sektor UKM yang paling kuat menghadapi gelombang resesi ekonomi global. Menteri juga mengapresiasi langkah Pemda setempat yang telah menyerahkan izin usaha untuk UKM ke kantor camat. Dan Klaten merupakan kabupaten yang ke 38 di Indonesia yang telah mendelegasikan izin UKM ke tingkat kecamatan.

Di tempat terpisah, Bupati Klaten Sunarna, memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Menkop UKM dan Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti yang telah memberi perhatian sekaligus bantuan kepada para pelaku UKM di kabupaten yang dipimpinnya. Ada sekitar 58 ribu lebih pelaku UKM di Klaten yang harus diberdayakan, agar kelak menghasilkan produk unggulan dan berdaya saing tinggi. (mh) Foto: Husen/parle/hr



Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini

Desakan revisi terhadap aturan jaminan hari tua (JHT) bagi para pekerja terus menguat. Idealnya, JHT memang hanya 5 tahun plus 1 bulan, bukan 10 tahun seperti ditawarkan pemerintah dalam PP No.46/2015 tentang JHT. Uji publik dan sosialisasi terhadap PP yang baru nanti harus dilakukan.

Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini (dapat Jateng VII) sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Se-

Idealnya JHT 5 Tahun 1 Bulan

lisa (7/7), mengatakan, PP No.46/2015 tersebut minim sosialisasi dan uji publik, sehingga menuai banyak kritik dari masyarakat, DPR, dan buruh. Komisi IX sendiri sudah mendesak untuk menarik PP itu sekaligus merevisinya dengan aturan yang baru.

“Kita minta pemerintah merevisi PP No.44,45,46 sekaligus. Itu harus segera direvisi. Kemudian setelah direvisi harus ada uji publik dan sosialisasi. Kemarin kelemahannya tidak ada sosialisasi dan uji publik. Jangan sampai kelalaian pemerintah sebelumnya terulang lagi. Jangan menunggu protes dari DPR, masyarakat, dan buruh, baru kemudian merevisi,” ujar politisi Partai Nasdem ini.

Seperti diketahui, ada tiga PP sekaligus yang mesti direvisi. PP No.44 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. PP No.45 tentang Jaminan Pensiun. dan PP No.46 tentang Jaminan Hari Tua. Yang utama, sambung Amelia, JHT harus direvisi dulu, karena PP inilah yang paling banyak mengundang protes luas di masyarakat. “Target kita dikembalikan ke

5 tahun. Jangan sampai mengurangi benefit yang sudah ada sebelumnya.”

Atas desakan Komisi IX, akhirnya revisi pun segera dilakukan dengan menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Ini keputusan penting yang harus diambil. “JHT itu, kan, tabungan pekerja. Pekerja tidak selamanya bekerja di sebuah perusahaan. Bisa saja memutuskan wirausaha dan lain-lain. Nah, sebetulnya program tersebut sangat bagus. Tapi idealnya menurut kami dan juga para pekerja, 5 tahun plus satu bulan. Itu baru ideal,” ungkap Amelia.

Dijelaskan Amelia, masing-masing jaminan bagi pekerja berbeda fungsi. Untuk jaminan pensiun dan hari tua benefitnya bisa setiap bulan. Jaminan pensiun ini hampir sama dengan taspen untuk PNS. Sementara JHT seperti Jamsostek. Saat pekerja di-PHK atau memutuskan berhenti bekerja, tabungan JHT bisa diambil. Syaratnya 5 tahun 1 bulan seperti diinginkan banyak kalangan. (mh)/foto:naefurodji/parle/hr

Legislator Desak Erupsi Sinabung Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

Muhammad Syafi'i, anggota Komisi VIII DPR mendesak Pemerintah segera menetapkan bencana erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara sebagai bencana nasional. Pasanya penanganan pengungsi letusan gunung tersebut masih belum memadai bila dibandingkan dengan peristiwa dan korban yang ditimbulkannya.

“Ada keinginan dari masyarakat dan Pemda Sumut agar Sinabung ditetapkan sebagai bencana nasional dengan harapan penanganannya lebih terintegrasi dengan program daerah dan pemerintah pusat,” kata Syafi'i dalam perbincangannya sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (7/7).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah bertahan bahwa bencana nasional ditetapkan berdasar kriteria



Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Syafi'i

dari jumlah korban jiwa. Padahal dengan lamanya masa kebencanaan, kerugian korban jiwa sudah lebih pa-

tokan yang ditetapkan.

Kondisi saat ini, lanjut dia, relokasi yang dibangun pemerintah tidak terkoordinasi baik antara pemda dan pemerintah pusat, sehingga di lapangan sebagian penduduk menolak. Pasanya, kalau dibantu dan berada di tempat lama, yang dibutuhkan bantuan rehab, tambahan tunjangan makan. Sedangkan relokasi, itu tidak hanya bangunan tetapi juga tempat mencari penghidupan. Begitu mereka dipindahkan dari pengungsian, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan mata pencaharian.

Penanganan pengungsi berdasarkan pengamatannya tidak bisa dilakukan secara baik, lebih terpadu, karena sifatnya parsial. Ada program pemda

Karo, ada program Pemprop dan juga ada pemerintah pusat. Maka dengan status bencana nasional, maka pemerintah langsung pegang kendali menjadi *leading-sector* bagaimana menanggulangi Sinabung.

“Ini sebenarnya yang harus dilakukan. Apalagi hingga kini erupsi masih terjadi,” ungkap anggota Dewan yang bertempat tinggal di Berastagi atau sekitar 40 km dari Gunung Sinabung.

Untuk status bencana nasional, kata dia, memang jumlah korban belum

sebanyak korban jiwa gunung Merapi. “Korban jiwa tidak sebanyak Merapi tapi masa bencana sudah berapa kali lipat dengan bencana Merapi sehingga kerugian Sinabung lebih besar,” papar politisi Gerindra ini.

Kalau patokan jumlah korban, mungkin menunggu bertambahnya korban dululah, baru pemerintah menetapkan sebagai bencana nasional. Bagi anggota DPR ini, sudah selayaknya erupsi Gunung Sinabung sebagai bencana nasional.

Kalau ada keinginan penanganan Sinabung melalui Menko, Syafii menyatakan penanganan dikordinasikan oleh Menko kalau bencana tersebut telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Usulan itu sejalan dengan Pidato penutupan Ketua DPR pada masa sidang sekarang ini bahwa diperlukan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi bencana Sinabung dipimpin seorang Menteri Koordinator. (mp)

foto: naefuroji/parle/hr

PIA DPR Bantu Korban Jatuhnya Hercules



Ketua PIA DPR Deisti A. Novanto saat mengunjungi korban Hercules di RSUP Adam Malik, Medan

Di bawah kepemimpinan Deisti A. Novanto, Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI semakin memantapkan diri untuk menjadi organisasi yang tidak hanya sebagai ajang kumpul dan silaturahmi para anggotanya, melainkan juga “berbuat” untuk masyarakat luas.

Ketua PIA, Deisti mengatakan sebagai makhluk sosial adalah kewajiban setiap insan untuk saling membantu dan menolong. Oleh karena itu dalam program yang disusunnya bersama pengurus PIA lainnya dalam setiap tahun selalu menyisihkan program sosial. Meski demikian tidak tertutup kemungkinan PIA juga menjalankan kegiatan di luar program yang telah disusunnya.

Sebut saja kunjungan ke para korban jatuhnya pesawat Hercules di Medan, Sumatera Utara, Senin (6/7) merupakan salah satu kegiatan di luar program yang telah disusun, yang sifatnya *accidental*, kecelakaan atau musibah.

“Kedatangan kami mengunjungi korban Hercules memang spontan dan di luar program. Tentu kami berduka atas peristiwa kecelakaan ini. Kami ikut bersimpati terhadap keluarga korban meninggal dunia, sekaligus *support* atau dukungan untuk korban yang saat ini masih di rawat di rumah sakit umum Adam Malik, Medan,” jelas Deisti saat mengunjungi korban Hercules di RSUP Adam Malik, Medan Sumatera Utara.

Pada kesempatan itu Deisti yang didampingi anggota PIA lainnya seperti Lia Bambang Haryo, Lina Tampubolon, Yayuk Dossy Iskandar, Wida Retno Jhonny, Rina Syamsudin Siregar, Iles Ferdiansyah memberikan santunan kepada korban, sekaligus mengapresiasi kinerja pihak RSUP Adam Malik dalam menangani para korban. Sebagaimana rumah sakit milik negara, RSUP Adam Malik tidak mengenakan biaya kepada para korban.

“Kami mengapresiasi kerja RS Adam Malik dalam menangani korban, sekaligus prihatin karena menurut korban belum ada pihak pemerintah ataupun instansi terkait yang mendatangi korban baik untuk mengucapkan duka cita ataupun dukungan terhadap korban yang masih dirawat di rumah sakit ini (RS Adam Malik),” ungkap isteri Ketua DPR RI, Setya Novanto ini. (Ayu) foto: ayu/parle/hr

Revisi UU Karantina Akan Perkuat Keamanan Pangan

Anggota Komisi IV DPR, Hermanto mengungkapkan revisi UU Karantina yang sedang dibahas di DPR saat ini nantinya akan memperkuat keamanan pangan dalam negeri dari serbuan produk pangan impor yang tidak berkualitas.

“Pada saat nilai rupiah menguat terhadap dolar, pasar tradisional kita dibanjiri oleh produk buah-buahan impor berharga murah. Buah-buahan itu bisa dijual murah karena di negeri asalnya, produk tersebut sudah dianggap sampah”, katanya dalam keteran-

gan tertulis yang diterima Parle Selasa (7/7).

Karena sampah, lanjutnya, kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Bagaimana kita akan bisa membangun sumberdaya manusia yang unggul untuk kemajuan bangsa di masa datang kalau yang dikonsumsi adalah produk pangan yang tidak berkualitas,” paparnya.

Saat ini DPR dan pemerintah tengah membahas RUU tentang Karantina



Hewan, Ikan dan Tumbuhan. RUU ini merupakan revisi dari UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. UU No. 16 Tahun 1992 sudah berumur lebih dari 20 tahun dan tidak bisa lagi mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan strategik lokal, nasional apalagi internasional.

Pembahasan diharapkan selesai dalam waktu dekat. “Setelah itu kita akan memiliki UU Karantina yang memungkinkan kita membangun karantina modern yang bisa melindungi kedaulatan negara yang antara lain dengan memperkuat cegah tangkal masuknya pangan impor yang tidak memenuhi standar keamanan pangan,” tuturnya.

Selain keamanan pangan, lebih jauh Hermanto mengungkapkan bahwa regulasi ini akan menjangkau juga penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam suatu sistem sumberdaya alam hayati (SDAH) nasi-

onal yang maju dan tangguh. Selain itu pencegahan keluarnya penyakit hewan karantina dari wilayah NKRI melalui sertifikasi media pembawa penyakit hewan karantina.

Di sisi lain, pencegahan keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah NKRI sesuai dengan persyaratan negara tujuan serta pencegahan introduksi dan penyebaran agens hayati, spesies asing invasif, dan produk rekayasa genetik yang berpotensi mengganggu lingkungan. Manfaat lainnya adalah pengawasan lalu lintas spesies langka yang masuk dalam daftar CITES dan pengawasan keamanan pakan dan lingkungan.

Menurut Hermanto, sekarang ini karantina hewan, ikan dan tumbuhan berjalan sendiri-sendiri. “Nanti, pasca disahkannya undang-undang ini, karantina kita akan terintegrasi dalam suatu kesisteman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,” ucapnya.



Anggota Komisi IV DPR, Hermanto

“Nanti, kita akan punya modal untuk turut serta dan berperan aktif dalam merumuskan konvensi-konvensi internasional di bidang perlindungan sumberdaya hayati sehingga dapat menjaga kepentingan nasional dalam perdagangan produk pertanian global dan regional,” pungkas politisi PKS ini menegaskan. (*,mp) foto: naefuroji/parle/hr

Terkait Kebakaran, Komisi V DPR Tinjau Bandara 2 E Soetta



Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, dan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana saat mengunjungi Bandara Soekarno Hatta, Banten

Terkait terbakarnya di terminal 2E, Komisi V DPR melakukan Kunjungan kerja spesifik ke Gandara Soekarno Hatta. Kunker spesifik tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana, Banten, Senin, (6/7).

“Komisi V DPR menyangkan kebakaran ini. menurut pengamatan kami ini bukan kecelakaan murni tetapi kesalahan atau kelainan yang terjadi, karena kebakaran ini terulang bahkan sudah 2 atau 3 kali, tahun 2014 kejadian kebakaran di KFC, kemudian pada tahun 2008 terbakar di rumah makan padang terkait kargo,” jelas Fary kepada wartawan.

Menurutnya, sistem pelayanan penumpang Garuda sudah

mulai berjalan dan dapat diatasi. “Hari ini mulai dapat diatasi, sistem sudah jalan tapi masih ada permasalahan penumpang yang masih menunggu,” papar politisi Gerindra ini.

Dia menegaskan, Komisi V DPR mendesak Otoritas Bandara dan Angkasa Pura menertibkan gerai-gerai dan penanganan kebakaran ini segera kita serahkan kepada pihak yang berwajib khususnya menyangkut kabel atau listrik.

“Kita minta segera melakukan audit menyeluruh berkaitan sistem kelistrikan dan penempatan gerai. Kita juga melihat posisi counter check in garuda persis dibelakang lounge yang kebakar, karena itu kita minta penempatan lounge jangan langsung berhubungan dengan check in penerbangan,” paparnya.

Dia mengatakan, Komisi V DPR meminta Angkasa Pura untuk melakukan check terkait kepemilikan gerai di bandara, jangan sampai ada raja diatas raja. “Kita tidak mau yang punya gerai banyak diberikan kepada pihak tertentu dan tidak terkontrol jadi Komisi V DPR bersama dengan Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN akan melakukan kontrol atau pengawasan ini,” tandasnya.

Komisi V DPR, lanjutnya, meminta Angkasa Pura untuk mencheck satu persatu gerai yang melanggar. sementara yang melanggar atau tidak sesuai pelayanan SOP harus diberikan sanksi dengan tidak diperpanjang kontraknya.

Dirut Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan segera menertibkan lounge dan gerai di bandara Soekarno Hatta sehingga dapat lebih dipertanggungjawabkan. “Kita mendukung sikap Komisi V DPR untuk melakukan evaluasi area komersial di Bandara,” jelasnya.

Terkait kebakaran di Bandara, Budi mensinyalir adanya kelalaian terkait kabel atau listrik. “Umur kabel di sini sudah mencapai 30 tahun artinya umurnya sudah melampaui, saat

ini kita sedang menyusun perencanaan untuk melakukan pergantian saluran kabel di Bandara,” paparnya. (Si) foto: [sugeng/parle/hr](#)

Desy Ratnasari Terpilih Jadi Ketua Pansus RUU Merek

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari (F-PAN) terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Merek. Keputusan ini didapatkan setelah rapat tertutup yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senin (6/07/15).

Terpilih mendampingi Desy sebagai Wakil Ketua Pansus RUU Merek yakni Anggota Komisi VI DPR Refrizal (F-PKS), Anggota Komisi VI DPR Iskandar Syaichu (F-PPP), dan Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw (F-Gerindra).

“Apakah susunan Pimpinan Pansus RUU Merek ini dapat disetujui?” tanya Fadli kepada seluruh perwakilan fraksi sekaligus Anggota Pansus. Seluruhnya menyatakan persetujuannya, sembari Fadli mengetuk palu persidangan. Palu persidangan pun diserahkan kepada Pimpinan Pansus RUU Merek.

Refrizal mengatakan, langkah pertama yang dilakukan Pimpinan adalah menggelar Rapat Pimpinan, untuk menentukan jadwal kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat intern bersama seluruh Anggota Pansus RUU Merek. (sf) / [foto:jaka/parle/hr](#)



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerahkan palu Pimpinan kepada Wakil Ketua Pansus RUU Merek Refrizal



Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana saat meninjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Komisi V DPR ingin memastikan kesiapan arus mudik angkutan laut berjalan lancar, termasuk kelengkapan fasilitas yang ada sesuai misi kemaritiman yang digaungkan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana saat meninjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jumat (3/7). Dia mengatakan meski fasilitas yang ada di Pelabuhan Tanjung Emas sudah baik dan lengkap, namun ke depan bisa terus ditingkatkan demi kenyamanan penumpang.

Pihaknya menginginkan agar penumpang yang turun di pelabuhan bisa diakomodasi dengan angkutan publik. Sebab, tidak semua penumpang yang tiba dijemput sanak dan saudara. Akses transportasi menuju ke kota menjadi salah

Angkutan Laut Perlu Improvisasi dan Terintegrasi

satu elemen penting untuk kelancaran dan kenyamanan pemudik. Ia mengapresiasi arus mudik menggunakan jalur laut meski okupasi penumpang masih jauh dari harapan.

Fasilitas Pendukung

“Sesuai jadwal bagus, tadi saya lihat meskipun penumpang sedikit namun kapalnya tetap berangkat hal itu menunjukkan kredibilitas dan profesionalisme dalam bisnis angkutan. Dengan angkutan laut bisa menekan kepadatan jalan. Kami berharap promosi angkutan laut ini terus ditingkatkan karena bisa mengurangi beban jalan,” ujarnya.

General Manajer PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Tri Suhardi mengatakan, seluruh fasilitas pendukung untuk memberikan kenyamanan dan memperlancar arus mudik sudah dipersiapkan.

Tahun ini pihaknya menyiapkan fasilitas tambahan berupa bus Damri gratis bagi pemudik yang turun di Pelabuhan Tanjung Emas.

“Bagi para pemudik yang berdomisili di sekitar Semarang tidak perlu khawatir karena pelabuhan terhubung dengan BRT yang jadwal keberangkatannya setiap 15 menit,” pungkask Suhardi. (oji) Foto: [Naefuroji/parle/hr](#)



Waspadai Potensi Penyempitan Jalur dan Pasar Tumpah



Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana berdialog dengan Kepala Terminal Harjamukti, Cirebon

Para pemudik dihimbau mewaspadai potensi terjadinya penyempitan jalur (*bottle neck*) di pintu keluar Ciperna Utama Tol Cikopo - Palimanan Jawa Barat dan Pasar Tumpah di sepanjang jalur Pantura.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia kepada awak media saat melakukan pemantauan persiapan arus mudik di Terminal Bus Harjamukti Cirebon, Kamis siang (2/7).

Yudi menambahkan potensi terjadinya kemacetan tersebut tidak bisa dihindari dan harus dibuat rencana rekayasa lalu-lintas untuk mengantisipasi dari sekarang. "Dari laporan jajaran Korlantas Polda Jawa Barat mereka sudah siapkan berbagai jalur alternatif serta rekayasa lalu-lintas untuk mengantisipasi dampak *bottle neck* tersebut," imbuh

Yudi.

Sementara itu, pihak Jasa Marga juga akan menerapkan sistem *open gate* di pintu masuk Tol Plumbon untuk menghindari penumpukan kendaraan. "Jadi nantinya pemudik hanya sekali berhenti saat membayar di pintu keluar," jelas Yudi.

Saat disinggung mengenai kondisi Terminal Harjamukti Cirebon yang masuk kategori Terminal Tipe A, politisi PKS ini mengaku prihatin dengan kondisi dunia angkutan darat. Salah satunya keberadaan bus besar yang sekarang jumlahnya tidak sebanding dengan kendaraan kecil (*mobil travel*).

"Idealnya lima banding satu dengan mobil kecil, namun untuk saat ini untuk jalur Bandung - Jakarta justru terbalik. Jumlah kendaraan kecil lebih banyak dibanding kendaraan bus besar," tuturnya.

Ditambahkan Yudi Widiana, kesiapan jalur mudik 2015 dianggap cukup matang. Tambahan Tol Cipali sehingga jarak tempuh Jakarta - Cirebon sampai Brebes sekitar 3 jam.

"Problem utamanya sekarang di jalur pantura adalah pasar tumpah," imbuhnya. Meski demikian, petugas kepolisian dan pihak terkait diharapkan membuat pembatas jalan (*line*) agar aktifitas jual-beli dan penyeberang tidak meluber ke jalanan.

Dalam rombongan tersebut nampak Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi, Daniel Muttaqien, Rendhy Lamadjido, Sudjadi, Syahrulan Pua Sawa dan Wardatul Asriah didampingi Kadishubinkom Maman Sukirman serta Kepala Terminal Harjamukti Edi Kurniadi. (Oji) Foto: Naefuroji/parle/hr

Tim Pengawas Intelijen DPR Segera Disumpah

DPR RI segera menetapkan Tim Pengawas Intelijen yang beranggotakan 15 orang anggota dewan lintas fraksi. Pembentukan tim yang merupakan amanat UU no.17/2011 tentang Intelijen Negara ini diharapkan dapat mengawasi dan mendorong kinerja aparat intelijen negara agar tetap independen.

"UU no17/2011 mengamanatkan pengawasan terhadap intelijen negara dilakukan secara berlapis baik internal yang dilakukan pimpinan masing-masing maupun eksternal oleh DPR RI yang dilakukan oleh komisi yang menangani bidang intelijen dalam hal ini Komisi I," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq saat menyampaikan laporan tentang pertimbangan calon

Kepala BIN dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/15).

Ia menambahkan menindaklanjuti amanat UU Intelijen Negara tersebut DPR telah menetapkan peraturan DPR no2/2014 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara DPR RI yang telah disahkan dalam rapat paripurna tanggal 26 September 2014. Daftar nama tim telah diserahkan fraksi dan siap untuk diambil sumpahnya.

"Tim Pengawas Intelijen Negara ini berasal dari perwakilan satu orang setiap fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI. Alhamdulillah Pimpinan Komisi I telah menerima surat dari fraksi mengenai usulan anggota tim untuk se-



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima laporan dari Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq

lanjutnya sesuai tata tertib akan diambil sumpah dan janjinya oleh Pimpinan DPR," tutur dia.

Lebih jauh politisi Fraksi PKS ini menjelaskan Tim Pengawas Intelijen Negara dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel. Tim akan



mencermati jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi intelijen negara, penyelenggaraan intelijen negara yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan UU.

Tim Pengawas Intelijen Negara dalam melaksanakan tugasnya menerima aspirasi dan pengaduan dari masyarakat terkait penyimpangan fungsi intelijen negara. “Tim bekerja senan-

tiasa berpedoman pada UU no17/2011, Peraturan DPR RI no2/2014 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara dan Peraturan Tatib DPR,” demikian Mahfudz. (iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Dorong Zero Bike Accident saat Mudik

Anggota Komisi V Roem Kono mendukung Pemerintah untuk dapat menertibkan pengguna kendaraan roda dua saat arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Pasalnya, hampir setiap tahunnya, mudik Lebaran selalu memakan korban dari pengendara motor. Sehingga, target *zero bike accident* (minim kecelakaan kendaraan roda dua) dapat tercapai.

“Kita harapkan Pemerintah dapat menertibkan pengendara motor ini, dengan membuat solusi yang terbaik, agar pengendara motor ini agar beralih ke kendaraan lain saat mudik. Kecelakaan yang selalu meningkat indeksinya itu kendaraan roda dua,” kata Roem, saat ditemui di Gedung Nusantara III, Jumat (3/07/15).

Politisi F-PG ini mengakui, selama ini masih banyak kendala dalam mencapai target *zero bike accident*. Salah sa-

tunya adalah kedisiplinan pengendara kendaraan roda dua.

Namun, secara umum ia berharap juga ke depannya, tidak ada kecelakaan lagi di semua jenis kendaraan saat mudik. Untuk itu, ia mengingatkan Pemerintah untuk dapat melengkapi sarana dan prasarana transportasi.

“Kecelakaan itu lebih disebabkan oleh kesalahan manusia atau *human error*. Perlu kehati-hatian dari semua pihak, dan kesempurnaan dari sarana prasarana, seperti rambu-rambu lalu lintas. Kita dorong agar sarana prasarana semakin dilengkapi, jika ada yang rusak juga diperbaiki,”

Politisi asal Dapil Gorontalo ini mengaku, hasil pembahasan dengan *stakeholder* terkait mudik ini, yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, pihaknya mendapat jaminan bahwa mudik tahun ini akan



Anggota Komisi V DPR Roem Kono

lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan adanya jalan-jalan tol yang baru selesai dibangun, dan sistem pelayanan terpadu, kami harapkan mudik tahun ini lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan tidak ada korban lagi, bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia. Semua harus ikhtiar, Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” harap Politisi yang juga menjabat Ketua BURT DPR ini. (sf)/foto:iwan armanias/parle/hr

DPR Sayangkan Lambannya Pemerintah Terbitkan PP THL-TB

Kalangan Komisi IV menyayangkan lambannya Pemerintah menerbitkan PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga berdampak pada tidak jelasnya nasib puluhan ribu Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian yang pernah dijanjikan diangkat sebagai PNS atau P3K.

Anggota Komisi IV dari FPG Firman Subagyo mengkritik lambannya pemerintah menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang P3K itu. Firman bahkan menuding pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk menuntaskan persoalan ini.

“RPP ini kan domainnya pemerintah, tapi mengapa tidak kunjung selesai sementara sudah 2 tahun lebih UU ASN



Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo

diundangkan. Ketentuan yang ada menyebutkan bahwa paling lambat 1 tahun setelah UU disahkan, maka RPP

sudah harus diterbitkan,” ujarnya, saat RDP Komisi IV DPR, membahas tindak lanjut Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluh, Kamis (2/7), di Gedung DPR, Jakarta.

Hadir dalam RDP tersebut, Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Soepijanto, Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tatang Taufik Hidayat, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsa Atmaja, dan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian



Negara S. Kuspriyo Murdono.

Oleh karena itu, Komisi IV dalam salah satu kesimpulan RDP meminta kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan RPP tentang P3K yang diupayakan 2 (dua) bulan sejak keputusan ditetapkan hari ini.

Komisi IV DPR RI juga akan melakukan Rapat Kerja Gabungan kembali dengan Komisi dan Mitra Kerja terkait untuk membahas tindak lanjut keputusan RDP kali ini.

Sebelumnya, terkait dengan penye-

lesaian masalah THL-TB Penyuluh Pertanian ini telah digelar rapat gabungan antara Komisi II, IV dan XI DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Keuangan dan Menteri PAN dan RB pada 11 Februari 2014 dan telah disepakati mengangkat 23.771 orang THL-TB lingkup Kementan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur P3K secara bertahap.

Sementara RDP dengan Kepala BPPSDMP Kementan, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kemen PAN-RB

dan Deputi Bidang Mutasi-BKN pada 19 Juni 2014 disimpulkan pengangkatan 10.000 THL-TB Penyuluh Pertanian menjadi Pegawai ASN diselesaikan pada tahun 2014.

Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsa-atmaja RPP tentang P3K ini masih dalam tahap harmonisasi di Kemenkum HAM dan telah diajukan sejak Januari 2015, namun hingga saat ini belum selesai karena antrian panjang di kementerian tersebut. (as) foto: iwan armanias/parle/hr

Tekan Harga Daging, Komisi IV Dukung Operasi Pasar



Ketua Komisi IV Edhy Prabowo saat memimpin kunjungan kerja ke Rumah Potong Hewan (RPH), Cibitung, Jawa Barat

Komisi IV DPR RI mendukung upaya pemerintah melakukan operasi pasar untuk mengembalikan harga daging ke harga yang lebih wajar. Kementerian Pertanian diharapkan dapat membangun sinergi dengan Bulog dan perusahaan BUMN PT Berdikari dalam melaksanakan upaya ini.

“Kita berharap dengan turunnya pemerintah melakukan operasi pasar, dimotori oleh Bulog dan didukung PT Berdikari dengan menjual daging Rp87000/kg bisa menstabilkan harga secara psikologis,” kata Ketua Komisi IV Edhy Prabowo saat memimpin kunjungan kerja ke Rumah Potong Hewan (RPH), Cibitung, Jawa Barat, Rabu (8/7).

la menambahkan harga daging di pasaran sejauh ini tercatat Rp120000/kg sama dengan harga tahun lalu. Ia berharap kegiatan operasi pasar yang konsisten, harga daging dalam negeri yang masuk kategori termahal di dunia bisa ditekan sampai mencapai titik normal.

Wakil rakyat dari dapil Sumsel I ini memaparkan Komisi IV telah menyepakati sejumlah kebijakan diantaranya anggaran yang mendorong upaya swasembada sapi, impor diutamakan pada sapi indukan, mendukung kebijakan larangan ekspor sperma beku bakal anakan agar sebesar-besarnya digunakan untuk keperluan dalam negeri.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker Agustina Wilujeng Pramestuti dari FPDIP menyambut baik kebijakan Menteri Pertanian untuk menggandeng PT Berdikari dalam operasi pasar daging. “Semua potensi harus kita gerakkan untuk mendukung, jadi apapun yang berhubungan dengan pemerintahan, perdagangan pangan, stok, supply harus diajak serta, termasuk Berdikari,” tekannya.

Sementara Susi Syahdona Marleny Bachsin dari FP Gerindra menyebut PT Berdikari adalah BUMN yang seharusnya sejak awal diberdayakan. DPR menurutnya siap mendukung anggaran agar peran Berdikari bisa lebih dioptimalkan. “Kita apresiasi peran Berdikari dalam operasi pasar, kenapa baru sekarang ya?” tutur dia.

Bersama tim kunker, Susi meninjau sejumlah fasilitas pemotongan dan pemrosesan daging PT Berdikari yang menurutnya cukup modern. Saat memasuki ruangan pemrosesan seluruh pengunjung yang masuk diminta mengenakan pakaian khusus, sepatu bot, masker dan penutup rambut agar ruangan pengolahan tetap terjaga higienitasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mendampingi kunjungan menjelaskan menjelang Lebaran nanti PT Berdikari diminta memasok 300-500 ton daging ke Bulog untuk kegiatan operasi pasar. Daging berasal dari sapi lokal dan sapi Brahman yang diimpor dari Australia. (iky) foto:iky/parle/hr



Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Yudi Widiana Adia saat meninjau persiapan mudik di Tol Cipali dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kamis - Jum'at (2-3/7) Foto: Naefuroji/Parle/HR



Suasana pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dipimpin Marwan Cik Asan dengan Wakil Gubernur DIY, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, KapW Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan DIY, Kamis (09/07) Foto: Sofyan/Parle/HR



PIA DPR RI dipimpin Deisti A Novanto saat mengunjungi masyarakat korban erupsi gunung Sinabung, Tanah Karo, Medan, Sumut, Selasa (07/07) Foto: Ayu/Parle/HR